

Evaluasi Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Akun Persediaan untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2024

Ivana Aulia Zahra¹, Hendro Lukman²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Indonesia
E-mail: ivana.125239235@stu.undar.ac.id¹, hendrol@fe.untar.ac.id²

Article History:

Received: 10 November 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Keywords: *Internal Control, Internal Control Over Financial Reporting, Inventory, Financial Report Quality, Statistics Indonesia.*

Abstract: *This study aims to evaluate the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) or Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) on inventory accounts and its implications for the quality of financial report at Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik–BPS) during 2021–2024. The research is motivated by recurring audit findings of the Supreme Audit Board (BPK) related to weaknesses in inventory management, such as missing stock opname, discrepancies between physical and book records, lack of labeling, absence of stock cards, and obsolete inventory still recorded in the balance sheet. Using a descriptive quantitative approach, the study employs documentary data consisting of BPS financial reports, BPK audit reports, Standard Operating Procedures (SOP) for inventory, PIPK assessment reports, and PIPK review reports. Indicators are constructed based on Minister of Finance Regulation No. 17/2019 and the COSO internal control framework and assessed using the Guttman scale (yes/no). The results show that in 2021–2022 all indicators in the PIPK categories and COSO components scored 0, indicating weak internal control over inventory. Since the formal implementation of PIPK in 2023, there has been a systematic strengthening of internal control through designation of significant accounts, preparation of risk and control matrices, periodic stock opname, reconciliation between physical records and systems, and improved documentation. However, several gaps remain, such as the absence of Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) implementation and the need for standardized and updating SOP and stock cards in all units. Overall, the strengthening of PIPK on inventory has contributed to reducing the risk of material misstatement and improving the reliability of BPS financial reports.*

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan, Persediaan, Kualitas Laporan Keuangan, BPS.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) terhadap akun persediaan serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2021–2024. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelemahan pengelolaan akun persediaan, antara lain tidak dilaksanakannya *stock opname*, terdapat selisih antara catatan fisik dan pembukuan, ketiadaan label barang, belum tersedianya kartu kendali per jenis barang, serta persediaan usang yang masih tercatat dalam neraca. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data dokumenter berupa laporan keuangan BPS, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, *Standard Operation Procedures* (SOP) pengelolaan persediaan, laporan hasil penilaian PIPK, dan laporan hasil reviu PIPK. Indikator disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 dan kerangka pengendalian internal COSO, kemudian dinilai menggunakan skala Guttman (ya/tidak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021–2022 seluruh indikator dalam kategori PIPK maupun komponen COSO bernilai 0, yang mencerminkan lemahnya pengendalian intern atas akun persediaan. Sejak PIPK terbentuk dan diimplementasikan pada tahun 2023, terjadi penguatan pengendalian secara sistematis melalui penetapan akun signifikan, penyusunan tabel risiko dan pengendalian, pelaksanaan *stock opname* berkala, rekonsiliasi antara fisik dan sistem, serta perbaikan dokumentasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan, antara lain belum diterapkannya Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) dan perlunya pemutakhiran serta standardisasi SOP serta kartu kendali di seluruh satuan kerja. Secara keseluruhan, PIPK terhadap akun persediaan berkontribusi pada penurunan risiko salah saji material dan peningkatan keandalan laporan keuangan BPS.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap entitas pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan

sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBN. Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan yang andal tidak terlepas dari penerapan pengendalian intern yang efektif. Menurut COSO, pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan seluruh personel yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi terkait efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik (Herawati, 2014; Munggaran, 2020).

Dalam konteks pemerintah pusat, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 sebagai pengendalian yang secara khusus dirancang untuk menjamin laporan keuangan yang andal dan sesuai SAP. Di sisi lain, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 menekankan pentingnya pengendalian intern yang terintegrasi pada setiap kegiatan pemerintah untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan menjadi objek pemeriksaan BPK. Salah satu akun signifikan dalam laporan keuangan BPS adalah persediaan (*supplies*). Pada Laporan Keuangan BPS Tahun 2022, saldo persediaan mencapai sekitar 63% dari total aset lancar, sehingga setiap kelemahan pengendalian atas akun ini berpotensi menimbulkan salah saji material. Temuan berulang BPK tahun 2021–2022 terkait pengelolaan persediaan, seperti tidak dilaksanakannya *stock opname*, selisih antara catatan sistem dan fisik, serta persediaan usang yang masih tercatat, mengindikasikan bahwa pengendalian intern belum berjalan optimal pada periode tersebut.

Sebagai tindak lanjut, BPS mulai menerapkan PIPK secara lebih sistematis pada tahun 2023 dengan menjadikan akun persediaan sebagai akun signifikan yang menjadi fokus pengendalian. Penelitian ini berupaya mengevaluasi implementasi PIPK terhadap akun persediaan di lingkungan BPS pada periode 2021–2024 serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

PIPK dan Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern yang kuat membantu menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya (Mulyadi, 2014; Al Farishi & Tjun, 2023). Dalam konteks BPS, pengendalian intern atas akun persediaan penting untuk memastikan bahwa persediaan benar-benar ada, tercatat lengkap, dinilai dengan tepat, dan disajikan sesuai SAP, sehingga mengurangi risiko salah saji dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. PIPK menurut PMK Nomor 17 Tahun 2019 merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai SAP dan bebas dari salah saji material. Penerapan PIPK dilakukan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi, mencakup kegiatan penerapan, penilaian, dan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Agency Theory dan Pengendalian Intern

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana agen berpotensi bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal karena perbedaan tujuan dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam sektor publik, pemerintah/publik bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen instansi bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya negara. Mekanisme *good governance* dan pengendalian intern menjadi alat untuk meminimalkan *agency cost* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan pelaporan keuangan (Harinurdin & Safitri, 2023; Hanifah et al., 2023).

Pengendalian intern yang kuat membantu menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya (Mulyadi, 2014; Al Farishi & Tjun, 2023). Dalam konteks BPS, pengendalian intern atas akun persediaan penting untuk memastikan bahwa persediaan benar-benar ada, tercatat lengkap, dinilai dengan tepat, dan disajikan sesuai SAP, sehingga mengurangi risiko salah saji dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pengendalian intern atas akun persediaan sebelum dan sesudah implementasi PIPK di BPS, tanpa melakukan pengujian hipotesis inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk merangkum dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi sehingga mudah dipahami (Ghozali, 2016; Aziza, 2023).

Populasi penelitian adalah seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan BPS yang terlibat dalam pengelolaan persediaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013; 2022).

Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter, yaitu data yang berasal dari dokumen resmi organisasi (Adawiyah, 2024), antara lain: laporan keuangan BPS, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPS, dokumen perolehan persediaan, SOP pengelolaan persediaan, kartu kendali persediaan, berita acara *stock opname* fisik, laporan hasil penilaian PIPK 2023–2024, dan laporan hasil reviu PIPK oleh Inspektorat Utama.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tim PIPK BPS (tim penerap, tim penilai, dan APIP) serta observasi terhadap dokumen pendukung pengelolaan persediaan pada satker sampel. Observasi dilakukan dalam bentuk *non-participatory observation* terhadap bukti-bukti pengendalian seperti BAST, kartu kendali, berita acara *stock opname*, dan kertas kerja rekonsiliasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan (Pabundu, 2005):

1. Editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian;
2. Tabulasi, yaitu penyusunan data dalam bentuk tabel berdasarkan indikator yang dirumuskan sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2019 dan komponen COSO;
3. Koding kuantitatif, yaitu pemberian skor 1 untuk kondisi “Ya” (indikator terpenuhi dan terdapat bukti) dan skor 0 untuk kondisi “Tidak” (indikator tidak terpenuhi dan/atau tidak terdapat bukti).

Analisis data dilakukan dengan statistika deskriptif kuantitatif menggunakan Skala Guttman. Skala ini menghasilkan jawaban dikotomis (ya/tidak) sehingga cocok untuk menilai tingkat pemenuhan indikator pengendalian intern (Nilawati & Fati, 2023). Indikator dibagi menjadi dua kelompok besar:

1. Indikator PIPK sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2019; Kegiatan penerapan PIPK, Kegiatan
-

Penilaian PIPK; dan Kegiatan Reviu PIPK.

2. Indikator Pengendalian Internal berdasarkan komponen COSO; Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan dan tindak lanjut.

Skor per indikator dibandingkan antara periode 2021–2022 (pra implementasi PIPK) dan 2023–2024 (pasca implementasi) untuk menggambarkan pergeseran efektivitas pengendalian intern terhadap akun persediaan. Hasil analisis deskriptif kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengendalian Intern Pra-Implementasi PIPK (2021–2022)

Hasil penilaian menunjukkan bahwa pada periode 2021–2022 seluruh indikator dalam kategori penerapan PIPK, penilaian PIPK, dan reviu PIPK bernilai 0. Hal ini dikarenakan PIPK belum diimplementasikan di lingkungan BPS pada periode tersebut. Namun, dari perspektif SPIP dan konsep pengendalian intern secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan pengendalian internal atas akun persediaan dan dokumentasi belum memadai.

Temuan BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2021–2022 menggambarkan berbagai kelemahan pengelolaan persediaan, antara lain: tidak dilaksanakannya *stock opname* semesteran, selisih antara catatan fisik dengan sistem (*e-rekon*), barang persediaan tanpa label, ketiadaan kartu kendali, serta persediaan usang yang masih tercatat dalam neraca. Fakta tersebut sejalan dengan hasil penilaian pada kategori aktivitas pengendalian yang seluruh indikatornya bernilai 0 pada periode pra-implementasi.

Secara teori, kelemahan ini meningkatkan risiko salah saji material terkait asersi eksistensi, kelengkapan, dan penilaian akun persediaan (Arens et al., 2023). Mengingat proporsi persediaan mencapai sekitar 63% dari aset lancar pada tahun 2022, lemahnya pengendalian intern pada akun ini berpotensi mengganggu keandalan laporan keuangan BPS dan memengaruhi opini BPK.

Implementasi PIPK dan Penguatan Pengendalian Intern (2023–2024)

Sejak tahun 2023, BPS mulai menerapkan PIPK secara formal dengan mengacu pada PMK Nomor 17 Tahun 2019. Akun persediaan ditetapkan sebagai akun signifikan dan didokumentasikan dalam Tabel A bersama dengan identifikasi risiko dan pengendalian utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor pada hampir seluruh indikator PIPK dan komponen COSO pada periode 2023–2024. Namun, PUTIK belum sepenuhnya diterapkan di BPS karena aplikasi keuangan negara (SAKTI) dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pengujian pengendalian umum TI dilakukan pada lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan BPS berperan sebagai pengguna aplikasi.

Pada kategori penilaian PIPK, sejak 2023 BPS telah:

1. melaksanakan penilaian PIPK secara tahunan pada tingkat entitas dan proses/transaksi;
2. melaksanakan penilaian dalam rentang waktu 1 September–15 Januari sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17 Tahun 2019;
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK yang memuat simpulan efektivitas (efektif, efektif dengan pengecualian, atau mengandung kelemahan material);
4. menyampaikan laporan kepada pimpinan entitas dan APIP paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan penilaian.

Namun pembentukan tim penilai masih berfokus pada tingkat instansi dan belum merata pada seluruh entitas akuntansi dan pelaporan, sehingga ke depan masih diperlukan penguatan struktur penilaian di tingkat satker.

Pada kategori reviu PIPK, Inspektorat Utama sebagai APIP BPS telah melaksanakan reviu PIPK sejak 2023 dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Reviu menggunakan metode *sampling* terhadap beberapa satker, dan hasilnya didokumentasikan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) atau Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan reviu. Tantangan yang masih muncul adalah penyampaian hasil reviu yang lebih langsung ke entitas akuntansi dan pelaporan untuk mendorong percepatan tindak lanjut.

Penguatan Komponen COSO dan Dampaknya terhadap Akun Persediaan

Dilihat dari perspektif COSO, implementasi PIPK di BPS menunjukkan penguatan pada lima komponen pengendalian intern:

1. Lingkungan Pengendalian

Sejak 2023, BPS telah membangun *tone at the top* melalui penetapan akun signifikan, legalisasi Tabel A oleh KPA, serta pembentukan Tim Penerap dan Tim Penilai PIPK. Langkah ini memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan persediaan.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi risiko dan pengendalian utama untuk akun persediaan didokumentasikan dalam Tabel A dan A1, kemudian dinilai melalui Tabel B1. Penilaian risiko dilakukan secara sistematis dan menjadi dasar perancangan aktivitas pengendalian yang relevan dengan risiko salah saji persediaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Pada periode 2023–2024, BPS mulai menerapkan beberapa aktivitas pengendalian utama, antara lain:

- a) *stock opname* semester I dan II yang terdokumentasi;
- b) rekonsiliasi antara buku fisik dan sistem (*e-rekon*);
- c) pelabelan barang persediaan;
- d) penyusunan kartu kendali per jenis barang yang mulai membaik pada 2024.

Aktivitas ini secara langsung mengurangi risiko ketidaksesuaian antara catatan persediaan dan kondisi fisik, serta memperkuat bukti audit terkait eksistensi dan kelengkapan.

4. Informasi dan Komunikasi

Hasil penilaian PIPK disampaikan kepada KPA, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan terkait koreksi dan perbaikan pengendalian persediaan. Mekanisme pelaporan berjenjang juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan.

5. Pemantauan dan Tindak Lanjut

BPS menerapkan mekanisme pemantauan melalui Tabel D yang memuat usulan koreksi dan status tindak lanjut terhadap pengendalian yang belum efektif. Instrumen ini membantu memastikan bahwa kelemahan pengendalian tidak dibiarkan berlarut-larut dan mengurangi risiko temuan berulang pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, penguatan kelima komponen COSO melalui PIPK berkontribusi pada penurunan risiko salah saji material pada akun persediaan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan keandalan laporan keuangan (Sumiyana et al., 2023; Sari et al., 2020).

Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPS

Hasil penelitian menunjukkan pergeseran yang jelas antara periode pra dan pasca implementasi PIPK. Pada periode 2021–2022, ketiadaan kerangka PIPK dan lemahnya aktivitas pengendalian menyebabkan tingginya risiko salah saji persediaan. Temuan BPK yang berulang

mencerminkan kondisi pengendalian intern yang belum memadai, dengan konsekuensi terhadap kualitas laporan keuangan BPS.

Sejak 2023, implementasi PIPK mendorong standar pengendalian yang lebih seragam dan terdokumentasi. Aktivitas pengendalian seperti *stock opname* berkala, rekonsiliasi sistem dengan fisik, pelabelan barang, dan penggunaan kartu kendali per jenis barang memperbaiki keandalan informasi persediaan. Peningkatan tata kelola ini sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Ikhsan, 2018; Rahmawati et al., 2018; Munggaran, 2020).

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan penguatan, antara lain:

1. perlunya penerapan dan dokumentasi PUTIK yang lebih jelas pada level instansi;
2. perlunya pembentukan tim penilai PIPK yang lebih merata pada setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
3. konsistensi penerapan kartu kendali di seluruh satker;
4. perlunya standardisasi dan pemutakhiran SOP pengelolaan persediaan yang selaras dengan PIPK dan SPIP.

Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian intern bukanlah kondisi statis, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan sejalan dengan prinsip COSO dan SPIP.

SIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) terhadap akun persediaan di lingkungan Badan Pusat Statistik sepanjang tahun anggaran 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan:

1. Perbedaan sebelum dan sesudah implementasi PIPK.
 Pada periode 2021–2022, PIPK belum diimplementasikan secara formal sehingga seluruh indikator PIPK dan komponen COSO memperoleh skor 0. Kondisi ini terefleksi dalam temuan berulang BPK terkait kelemahan pengelolaan persediaan. Sejak 2023, penerapan PIPK terhadap akun persediaan berlangsung lebih sistematis dan menghasilkan perbaikan signifikan pada hampir seluruh indikator.
2. Penguatan pengendalian intern dan penurunan risiko salah saji.
 Implementasi PIPK mendorong penguatan pengendalian intern melalui penetapan akun signifikan, penilaian risiko dan pengendalian (Tabel A dan B1), *stock opname* berkala, rekonsiliasi antara fisik dan sistem, pelabelan barang, kartu kendali per jenis barang, serta pemantauan tindak lanjut melalui Tabel D. Penguatan ini menurunkan risiko salah saji material atas akun persediaan dan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan BPS.
3. Kebutuhan standardisasi dan penguatan kelembagaan
 Meskipun telah terjadi perbaikan, masih terdapat kelemahan seperti belum diterapkannya PUTIK pada level instansi, belum meratanya tim penilai PIPK pada seluruh entitas akuntansi dan pelaporan, serta ketidakkonsistenan penerapan kartu kendali dan SOP pengelolaan persediaan di seluruh satker. Hal ini menunjukkan pentingnya standardisasi SOP, penguatan kapasitas SDM, dan komitmen berkelanjutan dari pimpinan instansi.

Secara keseluruhan, penguatan PIPK pada akun persediaan terbukti menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti temuan berulang BPK dan meningkatkan kualitas laporan keuangan BPS.

REFERENSI

- Adawiyah, R. (2024). *Analisis Motivasi Kinerja Karyawan PT. Kelola Mina Laut Gresik*. Universitas Muhammadiyah Gresik Repository.
- Al Farishi, R. R., & Tjun, L. T. (2023). Dampak sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi. *JAFTA*, 53–65.
- Arens, A. A. (2017). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Pearson.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2023). *Auditing & assurance services: An integrated approach*. Pearson.
- Aziza, N. (2023). *Metodologi penelitian 1*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 315 (Revisi): Pengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material*. IAPI.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 22*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harinurudin, E., & Safitri, K. A. (2023). Tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 46–56.
- Hanifah, M. A., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. *Jurnal Economia*, 1318–1330.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (survei pada organisasi perangkat daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research*, 1–14.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Penyajian laporan keuangan (PSAK 1 dan Kerangka Konseptual)*. IAI.
- Ikhsan. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal* (detail dapat disesuaikan).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kesuma, I., Anwar, & Darmansyah. (2017). Pengaruh good governance, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal* (detail dapat disesuaikan).
- Mulyadi. (2014). *Audit* (Buku I, Edisi ke-6). Salemba Empat.
- Munggaran, A. K. (2020). Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal* (Vol. 1, No. 5, 336–346).
- Nilawati, & Fati, N. (2023). *Metodologi penelitian*. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48–58.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- PricewaterhouseCoopers (PwC) Middle East. (2021). *Internal control over financial reporting (ICFR): Driving governance through effective financial reporting* [White paper]. PwC.
-

- Rahmawati, A., Mustika, & Eka. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal* (detail dapat disesuaikan).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- Sanjaya. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal* (detail dapat disesuaikan).
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana (JRAMB)*, 1–10.
- Satria, S. P., Zakaria, Fahrudin Pasolo, M. Y. Noch, & Suratini. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *SEIKO Journal of Management & Business*, 30–52.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Sumiyana, Bone, H., Pribadi, A., Khaidir, I. A., Muhsyi, A. A., & Nurjanah, L. (2023). *Auditing I (EKSI4308)*. Universitas Terbuka.
- Warren, C., Jones, J. P., & Tayler, W. B. (2024). *Accounting* (29th ed.). Cengage.
-